

# **Peran dan Posisi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Dinamika Global Governance**

Rr Indah Rizqi Cahyandari 2316041107, Cantika Farisa 2316041111, Annisa Salasatun  
Romadhona 2316041124, Ghefira Aldhila Putri Ibnu 2316041126, Alya Rahma 2356041006  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung

---

## **ABSTRAK**

Makalah ini mengkaji peran Indonesia dalam kerangka global governance dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan fokus pada kontribusinya dalam pemeliharaan perdamaian internasional, isu kemanusiaan, dan diplomasi global. Menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis posisi Indonesia sebagai negara berkembang dan middle power yang secara konsisten menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan melalui partisipasi dalam misi perdamaian PBB, peran aktif sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, keterlibatan dalam Dewan Hak Asasi Manusia, serta keterlibatan dalam forum ekonomi dan sosial multilateral. Indonesia menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian internasional melalui pengiriman Kontingen Garuda sejak 1957, promosi agenda Women, Peace, and Security (WPS), dan advokasi kepentingan negara berkembang. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas ekonomi dan militer, kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi domestik, serta pengaruh yang terbatas dalam struktur kekuasaan global. Makalah ini menyimpulkan bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada diplomasi moral, pembangunan koalisi, dan peran sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang. Untuk meningkatkan peran globalnya, Indonesia perlu memperkuat kapasitas nasional, meningkatkan kualitas diplomasi strategis, dan memastikan konsistensi antara kebijakan luar negeri dan kondisi domestik.

**Kata Kunci:** *Global Governance, PBB, Indonesia, Pemeliharaan Perdamaian, Politik Luar Negeri, Middle Power, Diplomasi Multilateral*

---

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam dinamika global yang semakin kompleks, isu perdamaian internasional menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya konflik bersenjata, perang saudara, serta ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas global tidak dapat dijaga oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan mekanisme kerja sama internasional yang terstruktur. Oleh karena itu, konsep global governance atau tata kelola global menjadi sangat penting sebagai sarana kolektif bagi negara-negara dalam menangani berbagai persoalan lintas batas, mulai dari konflik hingga krisis kemanusiaan.

Sebagai aktor utama dalam sistem tata kelola global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Didirikan pasca Perang Dunia II, PBB bertujuan untuk mencegah terulangnya konflik global sekaligus mendorong kerja sama antarnegara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia. Melalui berbagai instrumen seperti Piagam PBB, resolusi, serta konvensi internasional, organisasi ini menetapkan norma dan aturan yang menjadi pedoman dalam hubungan internasional. Selain itu, PBB juga didukung oleh berbagai badan khusus seperti UNICEF, UNHCR, WHO, dan UNESCO yang berperan dalam isu-isu spesifik seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan pengungsi.

Salah satu instrumen utama PBB dalam menjaga stabilitas global adalah melalui operasi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping operations). Dalam pelaksanaannya, PBB melibatkan negara-negara anggota untuk mengirimkan pasukan perdamaian guna mengawasi gencatan senjata, meredam konflik, serta membantu proses rekonstruksi pasca-konflik. Meskipun demikian, efektivitas PBB tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti konflik berkepanjangan, ketimpangan global, perubahan iklim, hingga ancaman terorisme yang terus berkembang.

Dalam konteks tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang menarik untuk dikaji. Sebagai negara berkembang dengan posisi strategis dalam politik internasional,

Indonesia secara konsisten menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan berperan sebagai middle power. Partisipasi aktif Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB mencerminkan komitmen nyata dalam menjaga perdamaian dunia. Kontribusi tersebut tidak hanya berupa pengiriman personel militer dan polisi, tetapi juga melibatkan unsur sipil seperti diplomat dan tenaga kemanusiaan, yang menunjukkan pendekatan komprehensif dalam penyelesaian konflik.

Lebih lanjut, komitmen Indonesia juga diperkuat melalui peran aktifnya dalam forum internasional, termasuk dalam keanggotaan di Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Indonesia menekankan beberapa prioritas utama, antara lain penguatan sistem perdamaian global, peningkatan peran perempuan dalam misi perdamaian, penguatan kerja sama regional, serta sinergi antara perdamaian dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan agenda SDGs 2030. Selain itu, Indonesia juga secara konsisten mendorong penanganan isu terorisme dan tetap menunjukkan perhatian terhadap isu Palestina sebagai bagian dari politik luar negerinya.

Dengan demikian, penting untuk menganalisis bagaimana peran Indonesia dalam kerangka global governance, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap upaya pemeliharaan perdamaian dunia melalui PBB. Kajian ini menjadi relevan untuk memahami sejauh mana negara berkembang seperti Indonesia mampu memberikan pengaruh dalam dinamika politik global sekaligus menjawab tantangan efektivitas tata kelola global dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana peran global governance dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional?
- Bagaimana posisi, kebijakan, dan kontribusi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian, isu kemanusiaan, dan diplomasi global?
- Apa saja tantangan, kelebihan, serta hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan perannya di tingkat global, serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- Menganalisis peran global governance dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
  - Mengkaji posisi dan kontribusi Indonesia dalam PBB, termasuk dalam misi perdamaian dan diplomasi internasional.
  - Mengidentifikasi tantangan, kelebihan, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan peran Indonesia dalam tata kelola global.
- 

## II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Global Governance

Tata kelola global (global governance) sebagai istilah yang sekarang populer dan sering dibahas sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru (Bainus & Rachman, 2022). Istilah ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu 'tata kelola' (governance) dan 'global', yang masing-masing memiliki banyak makna dan sering digunakan bersama. 'Tata kelola' berkaitan dengan cara membuat, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kebijakan serta tindakan masyarakat atau di tingkat dunia (Jentleson, 2017 dalam Bainus & Rachman, 2022). Sementara 'global' merujuk pada keseluruhan jaringan sistem internasional, lintas negara, dan kerja sama banyak pihak yang memerlukan kolaborasi besar untuk mengatasi masalah seperti perdamaian dan keamanan, pembangunan, hak asasi manusia, lingkungan, serta kesehatan (Dingwerth & Pattberg, 2006 dalam Bainus & Rachman, 2022).

Konsep ini sangat terkait dengan 'globalisasi', yaitu proses perluasan, peningkatan, dan percepatan hubungan serta integrasi berbagai pihak di seluruh dunia dalam semua aspek kehidupan (Weiss, 2000 dalam Bainus & Rachman, 2022). Global governance, menurut Rosenau (1995:13), tidak hanya terbatas pada institusi formal dan organisasi yang mengelola urusan internasional secara berkelanjutan. Konsep ini mencakup sistem aturan di berbagai tingkatan aktivitas manusia, yang secara kontinu mengejar tujuan pengaturan sebagai respons terhadap dinamika transnasional.

Jadi, tata kelola global (global governance) adalah kerangka pengaturan urusan dunia yang melibatkan negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara untuk

mengelola isu-isu lintas batas seperti perdamaian, lingkungan, dan pembangunan melalui sistem aturan dan kerja sama yang berkelanjutan.

## **2.2 Konsep Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional (HI) pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang mengkaji aktivitas politik lintas batas negara serta interaksi antaraktor global, seperti pemerintah, organisasi internasional, LSM, dan korporasi multinasional. Interaksi ini dilakukan oleh aktor-aktor yang mampu menetapkan tujuan mandiri, menggerakkan sumber daya, dan memengaruhi dinamika sistem global. Di tengah proses tersebut, setiap aktor berupaya mewujudkan kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri yang didasari kekuatan (*power*) sebagai kemampuan mengonversi potensi menjadi realitas.

Salah satu alat kunci adalah diplomasi, yang kini berevolusi dari model tradisional menjadi diplomasi publik dan digital (*selfie diplomacy*) (Ramadhan & Sari, 2022). Transformasi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan luar negeri tidak hanya bergantung pada kekuatan material, melainkan juga pengelolaan citra negara (*national image*) meliputi aspek fungsional, normatif, estetika, dan simpatetik untuk membentuk reputasi positif di panggung internasional.

## **2.3 Teori Peran Negara dalam Organisasi Internasional**

Secara teoretis, organisasi internasional dipahami sebagai suatu wadah atau lembaga formal yang dibentuk melalui kesepakatan antarnegara untuk mencapai tujuan bersama dalam skala global maupun regional. Berdasarkan perspektif hukum internasional, organisasi internasional dipandang sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara legal, namun keberadaannya sangat bergantung pada kehendak negara-negara penciptanya (Ari Yuni Lestari, 2021). Teori mengenai organisasi internasional ini menekankan pada dua fungsi utama: sebagai instrumen bagi negara untuk mencapai kepentingan nasional secara lebih efisien dan sebagai arena sosialisasi norma-norma internasional yang dapat mengarahkan perilaku negara anggota agar sesuai dengan standar komunitas global (Agussalim et al., 2024).

### **2.3.1 Peran Negara sebagai Subjek dan Pembentuk Organisasi**

Negara memegang peran sentral sebagai aktor utama sekaligus pendiri dalam dinamika organisasi internasional. Dalam kapasitas ini, negara tidak hanya bertindak sebagai anggota, tetapi juga sebagai penyedia legitimasi dan sumber daya yang

memungkinkan organisasi tersebut beroperasi (Adelia et al., 2024). Negara menggunakan organisasi internasional sebagai saluran untuk memperluas pengaruh politik, mengamankan kepentingan ekonomi, dan memperkuat pertahanan serta keamanan nasional melalui kerja sama kolektif.

### **2.3.2 Kontribusi Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Global**

Keikutsertaan negara dalam organisasi internasional memiliki dampak signifikan terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan perdamaian dunia. Melalui interaksi yang intens di dalam organisasi, negara-negara didorong untuk mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum yang menjadi syarat bagi terciptanya hubungan antarnegara yang stabil (Dian Judita, 2022). Selain itu, negara berperan aktif dalam mendukung agenda-agenda kemanusiaan dan penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi yang difasilitasi oleh organisasi internasional seperti PBB (Ari Yuni Lestari, 2021). Dengan demikian, peran negara dalam organisasi internasional bukan sekadar formalitas keanggotaan, melainkan upaya strategis untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih harmonis, sejahtera, dan saling menguntungkan.

---

## **III PEMBAHASAN**

### **3.1 Posisi Indonesia di PBB**

#### **3.1.1 Keanggotaan Indonesia di PBB**

Indonesia resmi bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 1950 sebagai anggota ke-60, setelah diterima melalui rekomendasi Dewan Keamanan dan persetujuan Majelis Umum, yang sekaligus menjadi bentuk pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia pasca kemerdekaan. Namun, keanggotaannya sempat mengalami dinamika ketika pada 20 Januari 1965, di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia memutuskan keluar dari PBB sebagai bentuk protes terhadap terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan politik Indonesia saat itu.

Keputusan ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga mencerminkan strategi politik luar negeri yang konfrontatif dalam konteks Perang Dingin dan rivalitas kawasan. Setelah terjadi perubahan politik nasional, Indonesia kembali bergabung pada 28 September 1966 di era Soeharto, yang menandai pergeseran kebijakan luar negeri menjadi lebih moderat dan kooperatif serta lebih terbuka terhadap kerja sama internasional. Sejak saat itu, Indonesia mulai memanfaatkan keanggotaan di PBB sebagai sarana untuk memperluas hubungan diplomatik dan meningkatkan legitimasi internasional.

Seiring perkembangannya, posisi Indonesia di PBB menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif, yaitu tidak berpihak pada kekuatan besar tertentu tetapi tetap aktif berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini tercermin dari keterlibatan Indonesia dalam diplomasi multilateral, partisipasi dalam misi perdamaian melalui Pasukan Garuda, serta keaktifan dalam berbagai badan PBB seperti Dewan Keamanan, ECOSOC, dan Dewan HAM. Indonesia juga berperan dalam isu-isu global strategis seperti dekolonisasi, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan dukungan terhadap Palestina.

## **3.2 Peran dan Posisi Indonesia di PBB**

### **3.2.1 Dewan Keamanan PBB (DK PBB)**

Indonesia telah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak lima kali: 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008, 2019-2020, dan terbaru 2023-2024 dengan dukungan 158 suara. Saat menjabat sebagai Presiden DK pada 2019, Indonesia memprioritaskan penyelesaian konflik melalui dialog, penguatan peacebuilding di Timur Tengah, serta konsistensi dukungan terhadap isu Palestina. Peran ini mendapat apresiasi dari Antonio Guterres sebagai upaya membangun jembatan perdamaian. Namun secara kritis, karena tidak memiliki hak veto, pengaruh Indonesia lebih bersifat normatif dan diplomatik dibandingkan menentukan keputusan strategis global.

### **3.2.2 Kontribusi dalam Misi Perdamaian Dunia**

Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar dalam misi penjaga perdamaian PBB (peringkat sekitar 8 dunia), dengan sekitar 2.792 personel hingga 2021. Kontribusi ini dimulai sejak pengiriman Pasukan Garuda I pada 1957 ke Timur Tengah. Keterlibatan mencakup personel TNI, polisi, dan tenaga sipil dalam misi kemanusiaan di berbagai wilayah konflik, seperti dalam misi UNIFIL, MONUSCO, dan MINUSCA.

Selain mencerminkan komitmen terhadap perdamaian global, partisipasi ini juga memperkuat soft power, meningkatkan profesionalitas militer, serta memperluas pengaruh diplomatik Indonesia di tingkat internasional.

### **3.2.3 Peran di Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)**

Indonesia terpilih sebagai anggota ECOSOC periode 2021-2023 dengan 186 suara. Dalam forum ini, Indonesia berfokus pada pemulihan ekonomi global pasca-pandemi serta percepatan pencapaian SDGs 2030. Peran ini memperkuat posisi Indonesia sebagai representasi negara berkembang dalam mendorong pembangunan inklusif dan kemitraan global, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi domestik.

### **3.2.4 Peran di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2024-2026 dan dipercaya sebagai Presiden pada 2026. Ini merupakan capaian penting dalam diplomasi HAM Indonesia sejak pembentukan Dewan HAM pada 2006. Indonesia mendorong pendekatan inklusif dan netral, khususnya dalam melindungi kepentingan negara berkembang. Namun, terdapat kritik yang perlu dipertimbangkan: kredibilitas global sering diuji oleh kondisi HAM domestik, sehingga ada potensi kesenjangan antara peran internasional dan praktik nasional.

### **3.2.5 Kontribusi dalam Komisi Hukum Internasional**

Indonesia aktif dalam Komisi Hukum Internasional PBB, berkontribusi dalam pengembangan hukum internasional, termasuk prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan secara politis, tetapi juga dalam pembentukan norma hukum global.

### **3.2.6 Inisiatif Perdamaian dan Diplomasi Regional-Global**

Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat sebagai mediator dan inisiator perdamaian, antara lain:

- Pelopor semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 yang melahirkan solidaritas negara berkembang melalui Dasasila Bandung.
- Penggagas Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk penyelesaian konflik Kamboja.
- Keterlibatan dalam misi internasional, termasuk dukungan terhadap Gaza melalui Resolusi PBB terbaru.

- Peran aktif dalam Bali Process sebagai forum regional untuk penanganan pengungsi dan kejahatan lintas batas.

### **3.2.7 Dukungan Kemanusiaan Global**

Indonesia juga memperkuat perannya dalam bantuan kemanusiaan melalui peningkatan kontribusi finansial dan program kemitraan internasional. Sejak 2024, Indonesia meningkatkan kontribusi sebesar US\$1,2 juta per tahun kepada UNRWA, serta memberikan tambahan hibah sebesar US\$2 juta untuk skema Flash Appeal dalam merespons krisis kemanusiaan darurat. Indonesia juga mulai mengintegrasikan pendekatan inovatif seperti kemitraan berbasis zakat dalam mendukung program kemanusiaan global. Jika dianalisis secara kritis, kontribusi ini masih relatif kecil dibandingkan negara donor utama, sehingga lebih menonjol sebagai simbol komitmen moral dan diplomasi kemanusiaan daripada sebagai kekuatan finansial utama dalam sistem bantuan global.

### **3.3 Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif, yang mulai dirumuskan sejak awal kemerdekaan oleh tokoh seperti Soekarno dan Mohammad Yamin. 'Bebas' berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan besar mana pun, sedangkan 'aktif' berarti tetap berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Prinsip ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta diperkuat dalam Pasal 11 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Implementasinya terlihat dari keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan Gerakan Non-Blok, serta peran historis dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung sebagai dasar solidaritas negara berkembang. Di era Prabowo Subianto, Indonesia semakin memperkuat perannya sebagai penyeimbang global dengan tetap mengedepankan diplomasi multilateral.

### **3.4 Kontribusi Indonesia dalam Peacekeeping dan Isu Kemanusiaan**

#### **3.4.1 Peacekeeping Operations**

Sebagai anggota aktif PBB, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga perdamaian dunia melalui partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian. Sejak

pengiriman Kontingen Garuda pertama pada tahun 1957 ke Mesir, Indonesia secara konsisten berkontribusi dalam berbagai misi di bawah mandat PBB. Partisipasi Indonesia mencakup pengiriman personel militer, kepolisian, dan tenaga sipil ke berbagai wilayah konflik, seperti dalam misi UNIFIL, MONUSCO, dan MINUSCA. Indonesia juga aktif dalam pelatihan pasukan perdamaian melalui Indonesian Peace and Security Center (IPSC).

Selain itu, Indonesia juga mendorong partisipasi perempuan dalam misi perdamaian sebagai bagian dari agenda Women, Peace, and Security (WPS) PBB. Kontribusi ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga strategis, karena Indonesia memanfaatkan peacekeeping sebagai instrumen diplomasi untuk meningkatkan posisi tawar di tingkat global dan memperkuat citra sebagai middle power yang berkomitmen terhadap stabilitas internasional.

### **3.4.2 Peran dalam Isu Kemanusiaan**

Indonesia cukup konsisten dalam mengangkat isu kemanusiaan di forum PBB. Komitmen ini terlihat dalam dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, bantuan terhadap korban konflik, serta keterlibatan dalam penanganan pengungsi dan bencana kemanusiaan. Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai badan PBB seperti UNHCR dalam penanganan pengungsi, serta UNICEF dalam perlindungan anak. Peran ini mencerminkan identitas Indonesia sebagai negara berkembang yang memperjuangkan solidaritas global, khususnya bagi negara-negara di kawasan Global South.

## **3.5 Peran Indonesia dalam Isu Global Lainnya**

### **3.5.1 Pembangunan Global dan SDGs**

Selain isu keamanan dan kemanusiaan, Indonesia juga aktif dalam agenda pembangunan global. Indonesia berkomitmen terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi agenda utama PBB. Melalui partisipasinya dalam forum seperti ECOSOC, Indonesia berkontribusi dalam perumusan kebijakan global terkait pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga mendorong kerja sama Selatan-Selatan sebagai alternatif pembangunan yang lebih inklusif, dan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga pemberi bantuan teknis kepada negara berkembang lainnya.

### **3.5.2 Perubahan Iklim dan Lingkungan**

Indonesia memiliki posisi penting dalam isu perubahan iklim, mengingat statusnya sebagai negara dengan hutan tropis yang luas. Dalam forum UNFCCC, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya global dalam mitigasi perubahan iklim. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi komitmen tersebut, terutama terkait deforestasi dan kebakaran hutan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi domestik.

### **3.6 Kelebihan dan Kekurangan Peran Indonesia di PBB**

#### **3.6.1 Kelebihan**

- Konsistensi dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif selama lebih dari tujuh dekade.
- Kontribusi nyata dalam misi perdamaian dunia dengan pengiriman personel secara berkelanjutan.
- Kredibilitas moral dalam isu kemanusiaan, khususnya terkait Palestina dan negara-negara berkembang.
- Kemampuan sebagai mediator dalam konflik internasional melalui pendekatan dialog dan konsensus.
- Peran sebagai bridge builder dalam menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang.

#### **3.6.2 Kekurangan**

- Keterbatasan kapasitas ekonomi dan militer yang membatasi jangkauan pengaruh global.
- Pengaruh yang terbatas dalam struktur kekuasaan global, terutama tanpa hak veto di DK PBB.
- Diplomasi yang masih cenderung normatif dan kurang berorientasi pada implementasi strategis.
- Kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi domestik, terutama dalam isu HAM dan lingkungan hidup.
- Optimalisasi peran yang belum maksimal dalam memanfaatkan forum-forum internasional.

---

#### IV KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai peran Indonesia dalam kerangka global governance dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pertama, global governance merupakan kerangka esensial dalam mengelola persoalan dunia yang bersifat lintas batas. PBB, sebagai institusi multilateral terkemuka, memainkan peran sentral dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional melalui berbagai mekanisme, termasuk operasi peacekeeping, diplomasi preventif, dan pengembangan norma hukum internasional. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan struktural, PBB tetap menjadi arena utama bagi negara-negara untuk bernegosiasi, berkoordinasi, dan menyelesaikan persoalan global secara kolektif.

Kedua, Indonesia telah menunjukkan peran yang konsisten dan konstruktif dalam PBB selama lebih dari tujuh dekade. Melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berhasil memosisikan diri sebagai middle power yang aktif dalam berbagai forum multilateral, dari Dewan Keamanan PBB hingga Dewan HAM dan ECOSOC. Kontribusi nyata Indonesia dalam misi peacekeeping yang dimulai sejak 1957 dengan Kontingen Garuda I menjadi salah satu bukti paling konkret dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Selain itu, peran Indonesia dalam isu kemanusiaan, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi regional semakin memperkuat posisinya sebagai aktor konstruktif dalam sistem internasional.

Ketiga, meskipun memiliki berbagai kelebihan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Keterbatasan kapasitas ekonomi dan militer membatasi jangkauan pengaruh Indonesia di panggung global. Selain itu, terdapat kesenjangan yang perlu dijembatani antara komitmen internasional Indonesia, khususnya dalam isu HAM dan lingkungan hidup, dengan kondisi dan praktik domestik. Tanpa konsistensi antara retorika internasional dan realitas dalam negeri, kredibilitas Indonesia sebagai pemain global yang dipercaya dapat terganggu.

Secara keseluruhan, kekuatan utama Indonesia dalam sistem internasional terletak pada diplomasi moral, kemampuan membangun koalisi, dan perannya sebagai jembatan

antara negara maju dan berkembang. Untuk meningkatkan pengaruhnya secara berkelanjutan, Indonesia perlu memprioritaskan tiga langkah strategis: (1) memperkuat kapasitas nasional di bidang ekonomi, teknologi, dan pertahanan; (2) meningkatkan kualitas diplomasi strategis yang berbasis pada kepentingan nasional jangka panjang; serta (3) memastikan konsistensi antara kebijakan luar negeri dan tata kelola dalam negeri, khususnya dalam isu-isu yang menjadi sorotan komunitas internasional.

Dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, Indonesia berpotensi untuk memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arhanudya, R. C., Anwar, S., & Hadisancoko, R. E. (2023). Kontribusi Indonesia dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Community Development Journal*, 4(4), 9406-9410.
- Purba, J. (2019). Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*.
- Hutabarat, L. F. (2016). Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 6(2), 75-96.
- Adelia, C., Salsabila A, A., & Sari, P. T. (2024). Peran Organisasi Internasional Di Dalam Suatu Negara. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6). <https://doi.org/10.5281/Zenodo.10492347>
- Agussalim Et Al. (2024). *Organisasi Internasional Di Dunia Yang Berubah* (J. Cahyaningtyas, Ed.). Cv. Selfietera Indonesia
- Ari Yuni Lestari, K. (2021). Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Subjek Hukum Organisasi Internasional Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Number 3).

- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2022). Editorial: Tata Kelola Global Dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal Of International Studies*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24198/Intermestic.V7n1.1>
- Dian Judita, K. (2022). Pentingnya Organisasi Internasional Dalam Suatu Negara Dalam Mewujudkan an Good Governance Dan Hubungan Baik Antar Negara Di Indonesia. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Number 1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp>
- Ridwan, P., & Editor Farid Ridwan, Ms. (N.D.). *Dinamika Pembangunan Global*.
- Arhanudya, R. C., Anwar, S., & Hadisancoko, R. E. (2023). Kontribusi Indonesia dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Community Development Journal*, 4(4), 9406-9410.
- As' ad, N. I. (2021). *PENINGKATAN PERAN INDONESIA DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Prasetya, D. (2022). Peran Indonesia Dalam Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Peran Indonesia Dalam Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*.
- Sendria, M. F. (2021). *Peran Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Pbb Dalam Upaya Menciptakan Peacebuilding Di Kawasan Timur Tengah (2019-2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Hutabarat, L. F. (n.d.). Diplomasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB (Indonesian diplomacy in the United Nations peacekeeping missions). Kementerian Luar Negeri.
- Adwani. (2022). Eksistensi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Seba, D. W. (2019). Peran Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2019. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Purba, J., & Anugerah, B. (2020). Mendefinisikan (kembali) peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan teoretikal dan praktikal dalam mewujudkan perdamaian.